

Nama : Okta Saputri
NPM : 2213031011
Mata Kuliah : Ekonomi Industri
Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., Dr. Nurdin, M.Si. dan Meyta Pritanddari,
S.Pd., M.Pd.

Tugas Pertemuan 9 Studi Kasus

1) Analisis Penyebab Kegagalan Implementasi Making Indonesia 4.0

Kegagalan relatif kebijakan *Making Indonesia 4.0* dapat dijelaskan melalui teori *industrial policy* dari Rodrik (2004) dan Lall (2003) yang menekankan pentingnya koordinasi, kapabilitas institusional, dan keterlibatan sektor swasta. Dalam praktiknya, kebijakan tersebut terlalu berorientasi pada *output* (target pertumbuhan dan digitalisasi) tanpa menyentuh *process-based industrial learning*. Pemerintah lebih fokus pada retorika transformasi digital dibanding penyediaan fondasi industri, seperti infrastruktur logistik, energi, serta riset dan inovasi. Selain itu, koordinasi antar-lembaga (Kemenperin, Bappenas, BKPM) masih lemah, sehingga kebijakan berjalan parsial dan tidak sinkron dengan kebutuhan dunia usaha. Kurangnya *human capital* digital juga menjadi penghambat adopsi teknologi industri 4.0 secara luas.

2) Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan

Vietnam berhasil karena menjalankan strategi *export-oriented industrialization* berbasis *foreign direct investment (FDI)* dan kejelasan arah sektor unggulan. Pemerintahnya berperan sebagai fasilitator aktif yang memberikan insentif fiskal, kemudahan lahan industri, dan stabilitas regulasi. Sementara Korea Selatan menerapkan pendekatan *developmental state*—di mana pemerintah memediasi antara pasar dan industri, memberikan subsidi investasi, serta mengontrol arah pengembangan sektor strategis melalui *Five-Year Plans*. Indonesia berbeda karena terlalu cepat melompat ke tahap industri berteknologi tinggi tanpa menyelesaikan masalah mendasar seperti efisiensi produksi dan daya saing tenaga kerja.

3) Rancangan Kebijakan Alternatif untuk Indonesia

Kebijakan alternatif yang kontekstual adalah *Agro-Industrial Deepening Policy*, yaitu memperkuat basis industri manufaktur melalui hilirisasi sumber daya alam dan integrasi dengan sektor pertanian. Rasionalnya, pendekatan ini sesuai dengan

keunggulan komparatif Indonesia dan dapat menciptakan *value chain* domestik yang kuat sebelum beralih ke industri berteknologi tinggi. Instrumen kebijakan yang disarankan mencakup:

1. Insentif fiskal adaptif untuk industri yang berinvestasi dalam riset lokal dan substitusi impor.
2. Pendirian pusat inovasi industri daerah (*regional tech-hubs*) bekerja sama dengan universitas dan swasta.
3. Kebijakan kawasan industri terpadu (*cluster-based policy*) agar tercipta aglomerasi ekonomi dan efisiensi logistik.
4. Skema pelatihan vokasi dan digitalisasi industri skala UKM untuk memperkuat rantai pasok nasional.